

PEOPLE POWER DALAM SUKSESI KEPEMIMPINAN DI MESIR

Oleh;

PUTRI REZKI MANAN

(Alumni Departemen Hubungan Internasional Fisip Universitas Hasanuddin)

Abstract

This research aims to describe about the influence of people power in the leadership succession in Egypt, specially the President Mursi's leadership. Where, at the time, it happened people power (people's movement) , which is a continuation of the Arab Spring revolution 2011, cause by the prolonged crisis and the ideals of the revolution that is not achieved.

The method of this research is analytical descriptive which aims to describe the phenomenons about the the influence of people power in the leadership succession in Egypt, specially the Mursi's leadership. Technique of data collection that used by the writer is the method that based on documents and internet, or usually known as library research, taken from many literatures, such as books, journals, articles, newsletters, and internet, that related to the author's thesis material. In this research, the writer also use qualitative technique of data analysis, which analyze background and the shape of the influence of people power in the leadership succession in Egypt, specially the President Mursi's leadership.

The results of research showed that the people power happening in Egypt exposed by the dissatisfaction and disappointment of the people against President Mursi, who betrayed the Arab Spring revolution results. And forget the ideals of the revolution, in form of freedom, justice, and welfare. This form of people power is unite the power of people marked by spreading propaganda in the media of communication and information (specially social media) and do action at the streets, by people of Egypt from various background, as well as opposition parties. As well as followed by the military coup d'etat.

Key words : *People power, succession, leadership, Mursi*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaruh *people power* dalam suksesi kepemimpinan di Mesir, khususnya pada masa kepemimpinan Presiden Mursi. Di mana, pada masa itu terjadi *people power* (gerakan rakyat) , yang merupakan kelanjutan dari revolusi *Arab Spring* 2011, akibat adanya krisis yang berkepanjangan dan cita-cita revolusi yang tidak tercapai.

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode analisis deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena-fenomena tentang pengaruh *people power* dalam suksesi kepemimpinan di Mesir. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah metode berbasis dokumen dan internet, atau yang lebih dikenal dengan metode telaah pustaka (*library research*), yang bersumber dari berbagai literatur, seperti buku-buku, jurnal-jurnal, artikel, surat kabar harian, dan internet yang terkait dengan materi

skripsi penulis. Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan teknik analisis data kualitatif, yang menganalisa latar belakang dan bagaimana wujud pengaruh *people power* dalam suksesi kepemimpinan di Mesir, khususnya pada kepemimpinan Presiden Mursi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *people power* yang terjadi di Mesir, dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan dan kekecewaan rakyat terhadap Presiden Mursi, yang mengkhianati hasil revolusi 2011 dan melupakan cita-cita revolusi tersebut, berupa kebebasan, keadilan dan kesejahteraan. Wujud dari *people power* ini berupa menyatukan kekuatan rakyat, yang ditandai dengan menyebarkan propaganda di media komunikasi dan informasi (sosial media) dan melakukan aksi turun ke jalan, yang dilakukan oleh rakyat dari berbagai kalangan (kelompok), maupun partai-partai oposisi. Serta diikuti oleh kudeta militer.

Kata Kunci: *People power, suksesi, kepemimpinan, Mursi.*

PENDAHULUAN

Perubahan sosial politik merupakan suatu hukum alam yang harus selalu di hadapi oleh setiap masyarakat dalam suatu negara. Perubahan terjadi tergantung sejauh mana tindakan rakyat terhadap pemerintah maupun sebaliknya. Membahas tentang perubahan, negara-negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara tak pernah lepas dari isu tersebut, yang menyebabkan konflik berkepanjangan. Konflik yang terjadi di Timur Tengah dan Afrika Utara, pada dasarnya, dilatarbelakangi oleh tuntutan rakyat yang menginginkan perubahan dalam sistem politik, pemerintahan, sosial, dan kebijakan ekonomi yang pro rakyat.

Mengawali tahun 2011, Timur Tengah dan Afrika Utara mengalami krisis kepemimpinan. Peristiwa ini bersamaan dengan munculnya *Arab Spring*, sebagai bentuk demokratisasi kawasan Timur Tengah. Pada dasarnya, negara-negara ini sudah menganut demokrasi, namun hanya sebatas formalitas saja. Demokrasi tersebut belum memberikan peluang untuk adanya suksesi kepemimpinan dan rakyatpun masih tertekan di bawah kekuasaan pemimpin.

People Power merupakan salah satu wujud gerakan rakyat dalam memberikan peluang untuk melakukan perubahan. *People power adalah* suatu gerakan yang terdiri dari sekumpulan individu yang menggabungkan kekuatan demi mencapai tujuan bersama dalam upaya penegakan kebebasan dan keadilan. Termasuk dalam gerakan politik dan perubahan sosial yang menentang pihak otoritas sebagai pemegang kekuasaan. "*People Power* di Timur tengah dan Afrika Utara ini mengarah pada tuntutan perubahan sistem pemerintahan. Rakyat, menginginkan sistem yang lebih egaliter dan aspiratif. Untuk itu, sasaran utama pergerakan yang dilakukan rakyat Timur Tengah dan Afrika Utara, adalah

suksesi kepemimpinan dan melakukan pemilihan umum yang jujur dan adil”.¹

Mesir sebagai salah satu negara di Afrika Utara, juga mengalami gejolak *Arab spring* pada tahun 2011. Revolusi yang dilakukan oleh rakyat ini terjadi menuntut adanya suksesi kepemimpinan dan perubahan sistem pemerintahan yang demokratis. Hingga akhirnya, revolusi itupun berhasil dengan turunnya Hosni Mubarak dari posisi kepresidenan dan dilaksanakannya pemilihan umum pada tahun 2012, dimana pada pemilu tersebut, Muhammad Mursi terpilih sebagai Presiden selanjutnya.

Mursi yang terpilih oleh suara rakyat melalui proses pemilihan umum, sebagai satu-satunya mekanisme transfer kekuasaan yang paling legitimatif, sekaligus paling menjadi terwujudnya demokrasi, nyatanya tak bisa membenteng *People Power* untuk menuntut pelengserannya. Tentu saja itu merupakan pengkhianatan terhadap demokrasi yang selama ini digaungkan.

Demonstrasi sejak dulu sudah sering terjadi, namun tidak pernah berhasil dalam mengubah tatanan yang ada apalagi, menumbangkan rezim yang berkuasa. Namun, lain halnya dengan *People Power* yang dapat melakukan keduanya. “Suara rakyat yang tergabung dalam *People Power* memiliki andil besar untuk mengubah dan menghentikan kekuatan politik apapun yang tidak sesuai dengan kepentingan bersama”². Hal ini merupakan salah satu wujud pengaruh dari *People Power*.

People power, meletakkan kekuatan rakyat sebagai poin utama dalam perubahan politik suatu negara. Dilihat dari sejarah suksesi kepemimpinan Mesir, selama ini terlihat bahwa, tidak ada satupun Pemimpin Mesir yang turun dari posisinya karena habisnya masa jabatan. Salah satu yang menjadi faktor penyebab dalam suksesi kepemimpinan di Mesir, yaitu *People Power*.

Sangat menarik melihat pengaruh *People Power* dalam proses revolusi Mesir dalam suksesi kepemimpinannya. Fenomena tersebut menjadi asumsi dasar penulis sebagai tantangan untuk mengkaji lebih jauh, khususnya pengaruh *People Power* dalam Suksesi kepemimpinan pada masa Pemerintahan Mursi, yang notabene merupakan pemimpin yang memiliki legitimasi yang kuat melalui demokrasi. Untuk itu, penulis menunangkan keinginan tersebut dengan judul **“Pengaruh *People Power* Dalam Suksesi Kepemimpinan Di Mesir”**

GAMBARAN UMUM

A. Masa Transisi Mesir Pasca *Arab Spring*

Revolusi *Arab spring* berhasil menggulingkan Hosni Mubarak pada 25 Januari 2011 merupakan awal dari demokratisasi yang ada di Mesir. selain itu

¹Amani Lubi.2011Perubahan Sosial-Politik di Timur Tengah. *Jurnal Luar Negeri Perubahan di TimurTengah dan Afrika*. ISSN 0215-1235.Hal.45

² Amani Lubis.2011. *Lok.Cit*. hal 43

juga dianggap sebagai revolusi pembebasan dari pemerintah otoriter, yang berfokus hanya pada kekuasaannya saja, tanpa mementingkan rakyat Mesir. dengan munculnya revolusi Arab spring di Mesir ini, menandai awal bagi transisi negara, menuju pemerintahan yang demokratis. Untuk membuat demokrasi berfungsi baik dalam kehidupan di Mesir, tentunya bukanlah perkara yang mudah. Hal itu juga kemudian dipaparkan oleh Trias Kuncahyono dalam bukunya yakni “ Demokrasi bisa bertahan bila ada pelembagaan dari cara-cara mencapai tujuan bersama serta kesepakatan untuk tetap saling percaya sebagai suatu bangsa meskipun berbeda pendapat. Hal inilah yang belum dimiliki Mesir. Kuantitas diskusi kenegaraan dalam wadah model pemerintahan demokrasi masih sedikit di Mesir.”³

Masa transisi di Mesir menuju demokrasi identik dengan peranan militer dalam politik dan ekonomi di Mesir. Secara historis, militer memiliki kekuasaan yang besar di Mesir. Hal ini dikarenakan, sejak kudeta militer 1952 yang dilakukan perwira bebas dan Gamal Abdel Nasser , sampai tahun 2011, seluruh Presiden Mesir selama ini berasal dari militer, entah itu angkatan darat maupun udara. “ sebanyak 40 persen perekonomian di Mesir juga dikelola dan dimiliki oleh militer. Urusan impor bahan baku untuk industri, konstruksi, produksi, bahkan bisnis *real estate* dipegang oleh orang-orang militer . pihak militer juga kerap ‘dipakai’ oleh politisi sipil untuk melanggengkan kekuasaannya. Model seperti ini dilakukan oleh Mubarak “⁴

Setelah husni Mubarak turun, militer terus mengambilalih dan mengintervensi segala yang berhubungan dengan pengambilan keputusan di Mesir. Ahmad Syafiq , sebagai Perdana Menteri saat Mubarak menjabat, kemudian di angkat menjadi Presiden sementara oleh militer sampai pemilihan parlemen dan Presiden dilakukan. Militer sebagai pemegang kendali masa transisi ini, duntut oleh rakyat untuk mengawal demokrasi dan melaksanakan pemilihan umum secepatnya. Sehingga pada akhir tahun 2011, militer segera melaksanakan pemilihan umum Parlemen yang kemudian disusul oleh pemilihan Presiden pada mei 2012.

Selama masa transisi ini, militer yang telah berhasil mengambil hati rakyat pada revolusi Arab Spring ini, mengalami sejumlah konflik akibat adanya politisasi dan ketidaksabaran rakyat untuk pengalihan kekuasaan kepada sipil. Militer menegaskan komitmennya untuk mengantarkan proses transisi politik dan kekuasaan di Mesir menuju terbentuknya sebuah pemerintahan sipil yang demokratis sesuai dengan amanat revolusi. Sehingga militer merancang sejumlah kebijakan melalui proses dialog dengan berbagai kelompok di Mesir.

Setelah dua hari Mubarak turun, militer mengeluarkan Deklarasi

³ Trisas Kuncahyono. 2013. Tahrir Square Jantung Revolusi Mesir. Jakarta :Kompas. Hal XXI

⁴ Ibid.

Konstitusional I yang memuat beberapa hal yaitu pembekuan Konstitusi Mesir; pembubaran dua lembaga perlemen yaitu Majelis Shaab dan Mejlis Shoura; penegasan sifat sementara kekuasaan militer selama enam bulan atau hingga pelaksanaan Pemilu Parlemen dan Presiden; keputusan untuk mempertahankan kabinet PM Ahmed Shafiq; keputusan untuk membentuk komite amandemen Konstitusi; dan komitmen untuk tetap menghormati perjanjian internasional yang mengikat Mesir.⁵

Deklarasi Konstitusional II merupakan hasil dari pemantapan deklarasi konstitusional sebelumnya. Deklarasi kedua memuat 63 pasal termasuk pasal-pasal yang diamandemen melalui referendum dan mengatur berbagai aspek ketatanegaraan Mesir serta kekuasaan transisional SCAF hingga pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden. Pokok-pokok amandemen yang tercakup dalam konstitusi tersebut yaitu pelanggaran mekanisme pencalonan presiden, pembatasan masa jabatan presiden (maksimal 2 tahun berturut-turut), pengembalian fungsi *supervise* penuh lembaga peradilan terhadap pelaksanaan pemilu/referendum untuk menjamin asas bebas, jujur, dan adil, pembatasan pemberlakuan darurat (6 bulan dan selanjutnya harus melalui referendum), dan pengaturan mekanisme penyusunan konstitusi baru oleh lembaga legislatif mendatang.⁶

Dari kedua kebijakan itu, maka dijadikan dasar untuk melakukan pemilihan parlemen. Dalam pemilu parlemen ini, kekuatan yang mendominasi bukan lagi berasal dari *National Democratic Party*, partai dari Mubarak, melainkan munculnya kekuatan baru yakni, kaum islamis sebagai kelompok yang mendominasi suara. Sehingga kaum islamis ini kemudian menjadi sebagai pemain utama dalam panggung politik di Mesir. Dan pada saat pemilihan Presiden pun, kaum Islamis, dari Ikhwanul Muslimin lagi-lagi mendominasi perolehan suara.

Ditengah menunggu hasil pemilihan presiden 2012, Militer secara tiba-tiba membubarkan parlemen dan mengambil alih kembali kekuasaan legislatif padanya kelompok militer. Dan siapapun yang akan menjabat sebagai Presiden bisa berkuasa tanpa pengawasan dari parlemen. Militer melakukan pembubaran ini didasarkan pada komposisi parlemen menurut konstitusi, yang dimana tidak ada keseimbangan komposisi didalamnya. Satu kelompok mendominasi lebih 2/3 kursi di parlemen. Sehingga asas mayoritas dan minoritas sangat terasa.

Menuju pilpres tahap kedua juga diwarnai berbagai aksi demonstrasi massa yang turun ke jalan. Para demonstran menyampaikan beberapa hal yaitu tuntutan mereka terhadap peralihan kekuasaan dari Dewan Militer Mesir ke sipil agar dilakukan secepatnya. Hal lain yang juga mendorong demonstran turun ke

⁵ A.M. Fachir. *Op. Cit.* hal. 19

⁶ *ibid*

jalan adalah keikutsertaan Ahmed Shafik dalam pilpres Mesir karena rakyat secara tegas menolak keterlibatan para politisi rezim sebelumnya dalam era pemerintahan baru. Terakhir adalah proses peradilan mantan presiden terguling Hosni Mubarak dan menteri dalam negerinya yang divonis peradilan Mesir atas hukuman seumur hidup sementara rakyat menginginkan Mubarak dan keluarga memperoleh hukuman mati.⁷

Pada masa transisi ini , ekonomi juga memburuk. Angka pengangguran mencapai 13,2 %. Angka kemiskinan naik tajam hingga 70%, dimana 48% warga Mesir hidup dalam kemiskinan dan keamanan pangan di Mesir menurut PBB meningkat . Angka kekurangan gizi juga meningkat menjadi 31 %. Akibat dari krisis politik di Mesir, investasi juga menurun tajam bahkan mencapai titik 0 dan bantuan dari Internasional Moneter Fund (IMF) menjadi sangat sulit didapatkan.⁸

Utang luar negeri dan domestik mencapai USD 180 miliar atau 90% dari pendapatan domestik nasional Mesir. Pemasukan negara juga susut akibat produksi terhenti, baik akibat revolusi maupun unjuk rasa buruh menuntut kenaikan upah. Pada Mei 2011, sektor industri Mesir merugi mencapai USD 3,2 miliar. Cadangan devisa Mesir anjlok dari USD 36 miliar pada Desember 2010 menjadi USD 16 miliar pada April 2012. Pemerintah Mesir mengklaim rugi USD 1 miliar per bulan sejak 25 Januari. Pertumbuhan ekonomi anjlok hanya 2,5% pada tahun 2011 dan hanya naik hingga 4% pada tahun 2012.⁹

B. Kondisi Mesir Pada Masa Kepemimpinan Mursi

1. Ideologi Politik

Ideologi politik adalah sebuah himpunan ide dan prinsip yang menjelaskan bagaimana seharusnya masyarakat bekerja, dan menawarkan ringkasan order masyarakat tertentu. Ideologi politik biasanya mengenai dirinya dengan bagaimana mengatur kekuasaan dan bagaimana seharusnya dilaksanakan

Sebagai sebuah negara, ideologi yang berkembang di Mesir, pernah mengalami perubahan, tergantung pemimpin yang berkuasa. Karena kepemimpinan dan ideologi suatu negara, adalah hal yang tidak bisa dipisahkan. Pada masa-masa awal terbentuknya Mesir sebagai republik, Mesir pernah menganut ideologi sosialisme. Ideologi ini dikembangkan oleh Nasser dan

⁷ _____, 2012, "Rakyat Mesir Tetap Minta Mubarak dan Keluarga Dihukum Mati", diakses melalui <http://www.metrotvnews.com/mobile-site/read/newsvideo//2012/06/05/152399/Rakyat-Mesir-Tetap-Minta-Mubarak-dan-Keluarga-Dihukum-Mati/7>

⁸ <http://www.kabar24.bisnis.com>

⁹ _____, 2012, "Mursi Vs Shafik, Citra IM Kontra NDP", diakses melalui <http://m.kompas.com/news/read/2012/05/27/03333571/mursi.vs.shafik..citra.im.kontra.ndp>

kemudian dilanjutkan oleh Anwar sadat, dengan sedikit perubahan (lebih terbuka). Ideologi ini pun menjadi dasar bagi kebijakan-kebijakan yang selanjutnya dikeluarkan. Contohnya Nasser yang mengeluarkan kebijakan tentang batas penguasaan tanah yang dimiliki oleh rakyat Mesir. Hal ini sesuai dengan ideologi sosialisme yang menekankan kesamarataan ekonomi dan tidak adanya kepemilikan publik.¹⁰

Namun, seiring dengan tuntutan perkembangan zaman, dan suksesi kepemimpinan, Mesir beralih dari ideologi sosialisme dan menganut ideologi liberalisme. Hal ini terlihat dari bagaimana proses pelaksanaan kekuasaannya, hubungan antara pemimpin dan rakyat, serta kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Mesir .

Liberalisme berasal dari kata *liberalis* yang berarti bebas. Dalam liberalisme, kebebasan individu, pembatasan kekuasaan raja (pemerintah), dan persaingan pemilik modal (kapital). Karena itu, liberalisme dan kapitalisme terkadang dilihat sebagai sebuah ideologi yang sama. Ada tiga hal yang mendasar dari Ideologi Liberalisme yakni Kehidupan, Kebebasan dan Hak Milik (*life, liberty and property*).¹¹ Ideologi ini mementingkan kebebasan perseorangan. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk individu yang bebas, pribadi yang utuh dan lengkap . Tanpa ada kekangan dari pihak manapun termasuk negara dan pemimpinnya.¹²

Liberalisme merupakan tahap awal demokratisasi di Mesir dan lingkungnya terbatas. Liberalisme meliputi proses mengefektifkan hak-hak tertentu yang melindungi individu dan kelompok-kelompok sosial dari tindakan sewenang-wenang atau tidak sah yang dilakukan oleh negara. Sedangkan demokratisasi yang berkaitan dengan kewarganegaraan , dimana demokratisasi mencakup hak untuk mendapat perlakuan yang sama dengan orang lain dan membuka akses terhadap seluruh rakyat.¹³

Berdasarkan konstitusinya, ideologi liberal yang dianut Mesir termakjub dalam beberapa artikel pada konstitusi Mesir 2012 saat Mursi memimpin, tepatnya pada bab 2 tentang hak sipil dan politik. berikut adalah artikel dalam konstitusi Mesir yang mencerminkan ideologi liberal yang dianutnya :

1. Artikel 45 “ *The freedom of thought and opinion are guaranteed. Every person has the right to express his opinion in speaking, writing, image, or otherwise, “* .

¹⁰ Riza sihbudi dan Hamdan Basyar. 2013. *Konflik dan diplomasi di Timur Tengah*. Jakarta : ERESKO

¹¹ *Loc.cit*

¹² Kenneth Newton dan Jan W.Van Deth. 2016. *Perbandingan Sistem Politik: Teori dan Fakta*. Bandung : Nusa Media . hal 375

¹³ DPR RI. 2016. *Ironi Demokrasi Setengah Hati : Studi Kasus Kontestasi Elite Politik*. Bekasi ; Penuru ilmu Sejati. Hal 42

2. Artikel 46 “ *Every citizen has the right to creative expression in its various forms.* “
3. Artikel Article 48 “ *the freedom of journalism , the press, the publishing, insdstry, broadcasting, and other media is guaranteed*”
4. Artikel 50 “ *The citizens have the right to organize public gatherings and engage in peaceful, unarmed demonstrations. The requires a notification as stipulated by law*”¹⁴

Dengan adanya konstitusi yang mengatur, rakyat secara bebas dapat mengungkapkan pendapatnya ,baik itu dalam bentuk perorangan maupun kelompok dalam bentuk demonstrasi di jalan.

Dalam realitas politik Timur Tengah saat ini, terutama di Mesir, politik Islam seolah menjadi kekuatan baru yang tidak terbantahkan lagi terutama pasca terjadinya *Arab Spring*. Menguatnya pengaruh politik Islam di Mesir , dengan munculnya kekuatan politik Ikhwanul Muslimin, menjadi permasalahan yang dihadapi oleh Mesir di tengah menguatnya tuntutan terhadap demokrasi itu sendiri. Karena pada dasarnya kelompok ini mengusung ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi liberal. Politik Islam sebagai ideologi dapat menjadi sebuah kekuatan baru dan juga sumber dari permasalahan yang ada dalam realitas politik Mesir .

Olivier Roy memandang bahwa politik Islam adalah gaya baru dari sebuah gerakan Islam yang modern yang memiliki tujuan spesifik untuk menciptakan prototipe masyarakat Islam yang sebenarnya. Hal yang sama juga dikatakan oleh Mohammed Ayoob bahwa Islam bukan hanya sekedar agama tetapi juga sebagai sebuah ideologi politik yang menjadi alat untuk mencapai tujuan politik yang terefleksi dari penggunaan simbol dan konsep Islamis di ranah publik ¹⁵

Ideologi yang pada dasarnya dapat dijadikan sebagai suatu komunikasi antara pemimpin dan rakyat, dan menjadi alat yang melegitimasi kekuasaan pemimpin, haruslah berasal dari ideologi yang sama. Seorang pemimpin , harus memiliki ideologi yang sama dengan apa yang diinginkan dan diyakini rakyat, agar kekuasaannya mendapatkan legitimasi.

Karena memberikan pengesahan pada pemerintah, ideologi membenarkan adanya ststus quo. Tapi, ideologi bisa juga digunakan oleh pemberontak atau pembaharu untuk menyerang status quo. Para pemberontak atau pembaharu bisa membenarkan tindakan kekerasan mereka dengan bersandar pada prinsip “hak-hak dasar”¹⁶ Ideologi yang dianut oleh Mursi,

¹⁴ <http://www.contituteproject.org>

¹⁵ Oliver dan Muh ayoob. Terdapat dalam Fakhri Gafur. Agama dan demokrasi : munculnya politik Islam. *Jurnal LIPI*. hal 6

¹⁶ Ibid

dijadikan sebagai salah satu alasan bagi pembaharu dan pemberontak untuk menyerangnya. Dengan berpegang pada prinsip “hak-hak dasar”, ideologi yang tadinya berbeda-beda diantara rakyat Mesir, bisa dengan mudah disatukan, untuk menyerang status quo.

Ideologi politik dapat mempengaruhi jalannya tindakan politik yang diambil. Konsep kesadaran politik jelas-jelas menunjukkan peranan ideologi. Sikap politik adalah jawaban serentak kepada situasi yang konkrit yang bangkit dalam masyarakat, dan manifestasi dari visi secara keseluruhan tentang kekuasaan, hubungannya dengan warga negara secara individual, dan konflik dimana kekuasaan adalah isu sentral.

2. Partai-Partai Politik.

Partai politik memainkan peran penting dalam kehidupan politik, sosial, dan ekonomi suatu negara. fungsi dari partai politik adalah a) untuk meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan; b) memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan c) membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹⁷

Dari kesemua partai politik yang ada di Mesir, *National Democratic Party (NDP)*, *An-Nour Party*, dan *Freedom Justice Party*, memiliki kekuatan yang mendominasi. *National Democratic Party (NDP)* merupakan partai pendukung Sadat dan Mubarak beserta pendukung rezimnya, sedangkan *Freedom Justice Party*, merupakan basis politik dari Ikhwanul Mulimin dan Mursi. Kedua partai ini mendominasi parlemen di rezimnya masing-masing. *National Democratic Party (NDP)* mampu menjadi partai yang tidak tersaingi saat rezim Sadat dan Mubarak memimpin. Dan *Freedom Justice Party* mampu menguasai 2/3 kursi di parlemen saat Mursi menjadi Presi

Peran partai politikakan semakin tampak, setelah melalui proses pemilihan umum. Dalam pemilihan umum tersebut, anggota partai akan berlomba untuk meraih kursi. Semakin banyak jumlah kursi yang diperoleh, maka semakin besar peran yang bisa anggota partai lakukan. Partai politik, selain dijadikan sebagai alat untuk berkuasa dan memperluas kekuasaannya, dengan mendominasi di pemerintahan khususnya parlemen, perolehan suara mayoritas sebagai salah satu faktor penentu dari hasil demokrasi, menjadi sangat mudah di dapatkan. Dengan demikian, suara partai yang seharusnya mencerminkan kehendak rakyat akan berbalik arah, menjadi keinginan untuk kepentingan partai saja.

¹⁷ Damang. Fungsi Parta Politik. Terdapat dalam <http://www.negarahukum.com/hukum/fungsi-partai-politik.html> diakses pada tanggal 10 Mei 2017

3. Mekanisme Kekuasaan

Kekuasaan Mesir dibagi menjadi tiga yaitu; kekuasaan eksekutif, legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Dalam negara yang menganut paham demokrasi yakni “kekuasaan yang dipegang oleh banyak orang “ ,ketiga kekuasaan tersebut diduduki oleh banyak orang dari semua masyarakat secara terpisah (*separation of power*) dan atau terbagi (*distribution of power*). Ketiganya memiliki fungsi masing-masing yang saling melengkapi. Legislatif sebagai pembuat kebijakan , yudikatif sebagai penguji materi kebijakan,dan¹⁸ eksekutif sebagai pelaksana kebijakan.¹⁹

Secara teoritis, kedua kekuasaan eksekutif Mesir dibagi, Presiden sebagai kepala negara, dan Perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Namun dalam prakteknya, kekuasaan hanya terpusat pada Presiden yang di pilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. ²⁰ Seakan Perdana Menteri hanyalah sebuah simbol semata, karena kekuasaan eksekutif berada di bawah kendali presiden .²¹ kekuasaan tertinggi ada pada Presiden. Melalui proses pemilihan umum yang dipilih oleh rakyat secara langsung ini, Presiden memiliki posisi dan legitimasi yang kuat.

Perdana menteri dalam sistem ini, tidak di pilih oleh parlemen, melainkan ditunjuk langsung oleh Presiden. Sehingga perdana menteri tidak mempresentasikan kepentingan parlemen dan tidak bertanggung jawab terhadap parlemen. Presiden pada esensinya adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden mengangkat dan memberhentikan perdana menteri dan menteri-menteri. Para menteri ini bertanggungjawab terhadap *people assembly* baik secara langsung maupun tidak langsung. ²²

Tak hanya melakukan pemilu presiden, Mesir juga mengadakan pemilu parlemen multipartai , yang dilakukan sebelum pemilihan presiden. Parlemen terdiri dari dua lembaga, yakni Majelis Sha’ab (Dewan Perwakilan) ,dengan komposisi 454 kursi; 444 dipilih melalui pemilu, 10 ditunjuk oleh presiden; masa jabatan selama 5 tahun dan Majelis Al-Shura (Dewan Penasehat), dengan komposisi 264 kursi; 176 dipilih melalui pemilu, 88 ditunjuk oleh presiden; masa jabatan enam tahun; pemilihan sela untuk setengah dari anggota yang dipilih) Pada masa kepemimpinan Mursi, parlemen didominasi oleh Partai Keadilan dan

¹⁹ Bambang Istianto. 2013. Demokratisasi Birokrasi. Jakarta : Mitra Wacana. Hal.23-24

²⁰ https://www.academia.edu/16979926/makalah_mesir

²¹“Revisi Perbandingan Sitem pememrintahan Mesir dan republik Iran” di akses melalui https://www.academia.edu/6533327/_Revisi_Perbandingan_Sistem_Pemerintahan_Republik_Iran_dan_Republik_Mesir

²²https://www.google.co.id/search?q=sistem+pemerintahan+dan+bentuk+pemerintahan+mesir&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjs-KnLwNTTAhWJuo8KHYYkNCUUQ_AUICSgA&biw=1366&bih=650&dpr=1

Kebebasan, dari kelompok Ikhwanul Muslimin. Hal ini menyebabkan, distribusi kekuasaan di Mesir menjadi tidak merata. Yang menjadikan, politik di Mesir rawan terhadap konflik di Parlemen.

Lalu kekuasaan ketiga di sistem politik Mesir adalah Yudikatif. Yudikatif merupakan lembaga independen yang mengawasi segala macam peraturan yang ada. Lembaga yudikatif di Mesir terdiri dari tiga lembaga yaitu : Mahkamah konstitusi, dewan Tinggi Hukum, dan dewan negara.

Kekuasaan di Mesir, adalah hal yang sangat sensitif dan rawan terjadinya gesekan antar kelompok yang memiliki kekuasaan yang besar. Hal ini pulalah yang menjadi salah satu faktor yang menentukan kestabilan politik di Mesir. Pembagian kekuasaan yang mengacu pada distribusi otoritas antara satuan-satuan pemerintahan nasional dan subnasional menjadi pekerjaan khusus tersendiri bagi pemimpin Mesir.²³ Pembagian kekuasaan yang horisontal tidak menyebabkan perbedaan tingkat kedudukan, akan tetapi lebih ditekankan pada pembagian kekuasaan dan wewenang secara mendatar yang terutama dilandaskan pada pembagian kerja dan spesialisasi. Setiap bagian dari pembagian kerja dan spesialisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya dikoordinir oleh kedudukan yang lebih tinggi derajatnya dan demikian seterusnya dari atas.

Diluar daripada kekuasaan yang berdasarkan lembaga negara, komposisi kekuasaan di Mesir, didominasi oleh 4 kekuatan. Kekuatan pertama yakni militer. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, militer selalu memiliki peranan penting dan sering terlibat dalam politik praktis. Hal ini menjadi tantangan serius bagi Mesir yang dalam proses membangun demokrasinya, kebijakan darurat militer dan kudeta yang dilakukan untuk memperkuat kekuasaannya di Mesir.

Kekuatan kedua, yakni berasal dari bekas rezim Mubarak (*felool*). Walaupun setelah Husni Mubarak tumbang dan dipenjara, namun bekas-bekas loyalisnya atau tangan kanannya tetap aktif berpolitik dan berusaha membangun kekuasaan kembali. Contoh yang paling sederhana yang bisa dilihat adalah pencalonan Ahmad Syafik sebagai presiden pada 2012 lalu.

Kekuatan ketiga, yakni berasal dari kelompok Islam Ikhwanul Muslimin. Berdasarkan sejarah Mesir, kelompok Ikhwanul Muslimin sudah memiliki posisi dan peran besar di politik Mesir sejak masa pemerintahan Anwar Sadat. Namun, kekuatannya semakin membesar ketika kelompok ini ikut dalam revolusi 2011. yang kemudian namanya semakin melambung, dengan kemenangan di pemilihan umum parlemen dan Presiden 2012. Ikhwanul Muslimin menjadi kekuatan yang kuat dan mendominasi, disokong oleh Mursi sebagai Presiden melalui kebijakan-kebijakan yang dibuatnya.

Kekuatan ketiga adalah kelompok Sekular-liberal. Meskipun merupakan

²³ Carlton C. Rodee. *Op.cit.* Hal72

kelompok minoritas di Mesir, namun kelompok ini mampu menegakkan kekuatannya. Terutama sebagai kelompok minoritas, yang menampung aspirasi-aspirasi dari kelompok minoritas lain. Sehingga kelompok ini sering terlibat dalam berbagai gerakan atau aksi dalam menuntut pemerintah.

Hubungan keempatnya tentu diwarnai oleh konflik dan perseteruan. Namun ketika Mursi menjabat sebagai Presiden, ketiga kelompok lainnya, selain dari pada kelompok Ikhwanul Muslimin, sama-sama bersatu untuk melengserkan Mursi dari kekuasaan.

PEMBAHASAN

A. Menyatukan Kekuatan Rakyat

Mesir yang juga pada tahun 2011 lalu, termasuk dalam negara yang mengalami gejolak *Arab Spring*, menuntut turunnya Husni Mubarak dari kursi kepresidenan dan menuntut segera dilaksankannya suksesi kepemimpinan secara demokratis pertama dalam sejarah Mesir. Semua elemen rakyat bersatupadu saling bergandengan tangan menyatukan kekuatan dengan satu tujuan yang sama. Hal itupun kembali terulang lagi pada masa kepemimpinan Mursi, yang terlipih secara demokratis melalui pemilihan umum pertama, menggantikan kepemimpinan otoriter Husni Mubarak.

Hal ini terjadi karena adanya ketidakpuasan rakyat terhadap kepemimpinan Mursi, yang sama sekali tidak memberikan perubahan yang signifikan pasca *Arab Spring* 2011 silam. Krisis ekonomi yang bekepanjangan, gejolak politik yang tidak pernah mereda, dan ketidakmampuan Mursi dalam merangkul semua kelompok. Dalam kata lain, Presiden Mursi hanya mementingkan kelompoknya saja, dengan menerapkan politik Islam di Mesir, yang tidak sesuai dengan kemajemukan dan sistem sekulerisme yang selama ini dianut oleh Mesir. Skeptimisme yang berkembang di kalangan rakyat Mesir, di bawah kepemimpinan Mursi menandakan bahwa Mursi tidak membawa Mesir ke arah republik demokratik melainkan menuju sebuah pemerintahan yang otoritarian seperti Mubarak dengan gaya Islamis (politik Islam)

Gerakan *people power* pada kepemimpinan Mursi ini dapat dikatakan masih merupakan sambungan dari rententan revolusi *Arab Spring* 2011 silam, yang pada kenyataannya belum sampai pada hasil yang diinginkan rakyat. Mesir yang masih dalam tahap transisi dari sistem pemerintahan otoriter menjadi sistem demokrasi yang seutuhnya, dinilai masih rentan terhadap gejolak rakyat. Hal ini dikarena rakyat menginginkan perubahan yang besar dan cepat, setelah terjadinya revolusi 2011 silam. Sedangkan realitasnya, tidak demikian.

People power dapat terjadi ketika masyarakat merasa faktor-faktor utama penyokong kehidupan yang seharusnya dipenuhi oleh negara, terabaikan begitu saja. Dan unsur utama itu adalah kesejahteraan dan keadilan. Rakyat

Mesir disini, merasa perlu melakukan perubahan dengan menyatukan kekuatan untuk mengontrol dan memperbaiki kehidupan mereka melalui sebuah gerakan dalam lingkup besar.

Sehingga dalam mewujudkan tujuannya, yang harus dipenuhi dalam sebuah *people power* adalah sekumpulan massa yang terorganisir melakukan gerakan untuk satu tujuan yang sama, mengatasnamakan keadilan dan kesejahteraan rakyat, dengan basis kekuatan yang berasal dari mobilisasi massa (jumlah massa). *People power* yang melibatkan massa rakyat sebagai subjek utamanya, menyebabkan proses ini berasal dari rakyat kalangan bawah. Sehingga dalam *people power*, mobilisasi massa memiliki peran penting dalam tercapainya tujuan utama. Hal ini dikarenakan *people power* merupakan bentuk tindakan kolektif dalam keadaan khusus dan lingkup yang besar. Mobilisasi adalah syarat tindakan kolektif untuk mencapai tujuan akhir bersama. “Yang mereka maksud dengan mobilisasi adalah proses yang dilalui kelompok yang merasa tak puas untuk berkumpul dan menghimpun sumber daya untuk mencapai tujuan kelompok. Mobilisasi membuka tahap utama berikutnya dalam perkembangan gerakan yakni pergerakan struktural.”²⁴

Jumlah menjadi hal penting bagi kekuatan politik yang diperhitungkan, apabila situasi krisis yang terjadi di Mesir mencapai pada tingkat di ambang batas, maka memungkinkan massa rakyat menjadi sadar akan situasinya yang buruk dan mencari solusi untuk mengatasi krisis yang ada.. Jumlah sendiri tidak bisa dipisahkan dari aksi dan organisasi kolektif, sebuah cara yang mungkin untuk memperoleh efektivitas politik dalam sistem demokrasi.

Dengan menekankan kekuatan pada struktur mobilisasi massa, *people power* di Mesir dengan mudah dikumpulkan, dengan rakyat yang kebanyakan adalah kaum muda. Menurut Marwan Bishara, kaum muda di dunia arab yang jumlahnya sekitar 60 persen, tidak hanya merupakan “bom demografis”, “beban ekonomi” atau ada yang menyebutnya sebagai “cadangan ekstrimisme”, tetapi juga menjadi kekuatan perubahan.²⁵ Lebih lanjut, Dalam setiap hal, semakin besar jumlah orangtua dalam suatu masyarakat, maka semakin kurang pula dinamisitas suatu masyarakat, dan cenderung bersifat imobilitas sosial.²⁶ Sedangkan kaum muda sebaliknya. Mereka cenderung radikal, dinamis, propokatif, identik dengan pencarian jati diri, serta terbuka akan hal baru, sehingga semakin dinamis pula masyarakatnya.

Kaum muda adalah agen perubahan (*agent of change*) dan pemegang masa depan sebuah negara. Posisi generasi muda dalam masyarakat menempati

²⁴ Oberscalls. 1973. Terdapat dalam Piotr Scztompka. 2007. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta : Prenada. Hal 342

²⁵ Mirwan Bishara. Terdapat dalam Trias Kuncayono. 2013. *Tahrir Square Jantung Revolusi Mesir*. Jakarta : Kompas .Hal 282

²⁶ Maurice Duverger. 2010. *Sosiologi Politik*, Jakarta : Rajawali Pers. Hal 69

tempat paling sentral , dalam artian bahwa pemuda berperan sebagai pelopor dan perintis pembaharuan.²⁷ Secara kualitatif, kaum muda memiliki idealisme , kritis, dinamis, kreatif, inovatif , dan memiliki enegrgi yang besar bagi perubahan sosial dan cenderung masih murni dalam perjuangannya. Idealisme yang dimaksudkan disini adalah idealisme yang diperjuangkan demi kepentingan masyarakat luas.

Selain itu, perkembangan informasi dan komunikasi juga semakin canggih. Globalisasi membuat penyebaran dan akses informasi dan komunikasi menjadi lebih mudah. Terlebih dengan adanya internet. Media komunikasi dan informasi (Internet) memiliki peran penting dalam menyebarkan pengetahuan dan informasi secara real time, sehingga hal ini bisa di jadikan sebagai senjata politik bagi rakyat Mesir.

Sudah menjadi rahasia umum, bahwa mayoritas pengguna internet adalah kaum muda. Rakyat mesir yang tergabung dalam *people power*, memanfaatkan internet khususnya , sosial media yang berkembang pesat saat ini, untuk mengorganisir dan memobilisasi massa dengan membuat propaganda-propaganda dan menyebarkan ide-ide serta gagasan mereka tentang perlunya ada perubahan pada Mesir. Sosial media ini mejadi alat integrasi sosial yang mampu menyatukan rakyat Mesir. Dan bahkan mampu menyalanya reformasi politik dan aksi sosial.

Dengan membentuk opini publik dari isu yang beragam, mampu membentuk solidaritas virtual, sampai pada semangat untuk turun ke jalan melakukan aksi. Dengan keyakinan yang digeneralisasikan, serta tujuan umum, untuk melakukan perubahan pada kehidupan mereka. Media sosial juga memiliki kemampuan fenomenal dalam memicu gerakan politik karena mampu menciptakan dan mengembangkan "*shared awareness*" di kalangan anggota sebuah gerakan politik. Dikatakan pula oleh Neidhardt dan Rucht yakni "Masyarakat yang sangat modern cenderung menjadi masyarakat gerakan."²⁸

Mobilisasi ini membuka tahap pertama dan utama dalam perkembangan gerakan. Makin banyak sumber daya yang berada di bawah komando, dan makin banyak total sumber daya yang berada di bawah satu komando , semakin besar pula gerakan dan tekanan yang mampu rakyat berikan kepada rezim yang berkuasa.

People power di Mesir adalah gerakan *grassroot* (akar rumput /kalangan rakyat biasa) , seperti ledakan protes dan ketidakpuasan yang berkepanjangan.

²⁷ Muhammad Budi Setiawan. 2008. *Mozaik Gerakan Pemuda Kontemporer*. Jakarta : Kemenpora. Hal 70

²⁸ Neidhardt dan Rucht .1991.Terdapat dalam Piotr Szompka. 2007. *Sosiologi Suatu Perubahan*. Jakarta : Prenada. Hal 329

Partisipasi rakyat Mesir dalam gerakan *people power* berupa tindakan kolektif seperti kerumunan, kerusuhan, unjuk rasa, dan orasi, yang dapat menciptakan ikatan dan komitmen antar individu untuk terus bersama dalam mengawal gerakan rakyat ini hingga akhir.

Berbagai kecaman dan kritikan, semakin menempatkan pemerintahan Mursi berada diposisi yang sulit dan dilematis. Setiap kebijakan yang dikeluarkan Mursi, selalu saja menuai penolakan dari rakyat. Gerakan-gerakan anti Mursi bukan lagi menjadi hal baru. Gerakan-gerakan ini berhasil menyatukan kekuatan rakyat yang berasal dari latar belakang berbeda, ideologi berbeda, dan kelompok yang berbeda. Bersatu dengan semangat motivasi, tujuan, dan emosi yang besar dalam melakukan perubahan. Hal ini diperkuat dengan dibentuknya kelompok Tamarrud pada akhir April 2013.

Tamarrud adalah gerakan pemberontakan akar rumput kaum muda (*grassroot*), yang dibentuk oleh lima orang pemuda yakni, Mahmoud Badar, M. Abdel Aziz, Hasan Shahin, Mai Wahba dan M. Haikal. Kelima orang ini merupakan pemuda yang berusia antara 22 hingga 30 tahun. Beberapa cara yang dilakukan oleh kelompok ini untuk memobilisasi rakyat Mesir adalah dengan cara membuat sebuah petisi sebagai bentuk ketidakpercayaan lagi kepada kepemimpinan Mursi dan menyerukan dilangsungkannya suksesi kepemimpinan. Mereka dengan sangat cepat, menyebarkan gagasan-gagasan lewat website dan sosial media dan mulai mengumpulkan tandatangan setiap rakyat yang lewat di Tahrir Square.

Dengan cara-cara seperti itu dan tentunya bersifat kontinue, kelompok Tamarrud ini berhasil dikenal oleh masyarakat dan mampu memberikan kesadaran kritis tentang situasi buruk yang dihadapi di bawah kepemimpinan Mursi. Kelompok oposisi pun, mendukung adanya kelompok Tamarrud ini. Bukan hanya di Kairo saja, aksi kelompok ini pun menularkan gerakannya ke kota-kota lainnya.

B. Melengserkan Presiden

People power yang melanda Mesir untuk menggulingkan Presiden Mursi, merupakan pengulangan sejarah dari revolusi yang menimpa Husni Mubarak. Ini merupakan akan sebuah rangkaian yang saling bertautan satu sama lain. Revolusi kedua ini merupakan kelanjutan dari hasil revolusi sebelumnya yang dianggap gagal. Mursi yang terpilih sebagai Presiden sipil Mesir pertama melalui pemilihan umum, melakukan pengkhianatan terhadap revolusi dengan melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya yang tidak pro rakyat.

Jean-jacques Rousseau dalam karyanya yang berjudul *Du Contrat Social* (1762) menulis tentang demokrasi yakni bahwa kedaulatan berasal dari

kehendak umum(*general will*) dan kebaikan publik(*Public good*) .²⁹ Bila kedua hal ini tidak terpenuhi, tentu keinginan untuk membentuk masyarakat baru tidak akan terwujud. Seperti Mesir yang mengalami proses transisi dari pemerintahan otoriter menjadi pemerintahan yang menganut paham demokrasi secara utuh.

Awalnya demokrasi merupakan pilihan terakhir rakyat Mesir daripada harus kembali ke pemerintahan yang otoriter. Namun, seiring perjalanan waktu, rakyat menilai kestabilan adalah hal yang penting. Pada masa kepemimpinan Mursi, stabilitas dan keberagaman terancam. Demokrasi pun mengalami kemunduran. Sehingga rakyat akhirnya kembali berpaling pada militer sebagai kelompok yang mampu mewujudkan keinginan rakyat. Daripada harus tetap pada demokrasi yang sesuai dengan keinginan Mursi, dengan mengesampingkan keberagaman dan keadilan.

Pemerintah sebagai penguasa memiliki kendali untuk melakukan pengamanan. Krisis politik dan ekonomi di tengah masyarakat, yang tidak dapat terselesaikan dengan baik, akan membuat prestasi pemerintah di mata masyarakat merosot dan dinilai tidak mampu dalam menjalankan tugasnya, sehingga menimbulkan huru-hara kekerasan di kalangan masyarakat yang tidak puas. Pada akhirnya keadaan yang bergejolak itu mengurangi keabsahan pemerintah di mata rakyat, pemerintah dianggap tidak memiliki lagi hak moral untuk memerintah.³⁰

Dengan mosi tidak percaya rakyat terhadap presiden Mursi, dan segala kekacauan yang ada dalam negara, maka militer dengan siap meng kudeta pemerintahan atas nama menyelamatkan negara. Militer menyelaraskan sejauh mana kepentingan pribadi dapat dibawa oleh faktor yang mendukungnya

Spawforth Hornblower dalam *The Oxford Companion to Classical Civilization* menyatakan bahwa kudeta adalah merobohkan legitimasi atau pukulan terhadap negara dengan melakukan tindakan pembalikan kekuasaan terhadap seseorang yang berwenang dengan cara ilegal dan sering kali bersifat brutal, inkonstitusional berupa "pengambil-alihan kekuasaan", "penggulingan kekuasaan" sebuah pemerintahan negara dengan menyerang (strategis, taktis, politis) legitimasi pemerintahan kemudian bermaksud untuk menerima penyerahan kekuasaan dari pemerintahan yang digulingkan.³¹

People power di Mesir, menciptakan suatu kondisi yang dimana negara mengalami gejolak yang berkepanjangan, sehingga militer sebagai penjaga

²⁹ Alfred Stephan. 1988. *Militer dan Demokratisasi*. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti. Hal 128

³⁰ Amos Perlmutter. 2000. *Militer dan Politik*. Jakarta : Raja Persada Utama. Hal 169

³¹ Hornblower, S., Spawforth, A. (eds.) *The Oxford Companion to Classical Civilization* (1998)

Terdapat dalam Azhari Setiawan. 2015. "Diplomatic Dilemma dan Standar Ganda Politik Amerika Serikat terhadap Konflik Sipil-Militer Mesir Tahun 2013", *JOM FISIP* .Volume 2 No. 1

keamanan dan ketertiban merasa perlu untuk mengintervensi atau ikut campur dalam menyelesaikan krisis tersebut. Dengan memberikan ultimatum kepada Mursi selama 2 kali 24 jam, untuk menyelesaikan krisis tersebut. Dan jika tidak, maka militer akan mengambil alih sementara pemerintahan. Hingga akhirnya pada tanggal 3 Juli 2013, militer dengan cepat melakukan kudeta terhadap Mursi. Bukan hanya itu, militer juga membekukan konstitusi yang dianggap tidak mencerminkan kehendak rakyat, membentuk pemerintahan baru, dengan mengangkat ketua Mahkamah Konstitusi tertinggi, Adly Mansour sebagai presiden sementara.³²

Terlepas dari banyaknya diskursus dan pertentangan tentang apa kah ini sebuah kudeta atau bukan. Disini penulis menekankan bahwa kudeta dan *people power* memainkan perannya masing-masing dalam proses revolusi Mesir. Lebih lanjut lagi , gerakan *people power* ini juga mampu menggeser identitas rakyat dari yang tak berdaya (*powerless*) menjadi rakyat yang memiliki kekuasaan (*powerfull*) , sesuai dengan konstitusi tahun 2012 dan mampu melakukan perubahan melalui tekanan dari gelombang massa yang besar . Dengan kata lain, ini adalah revolusi rakyat yang di puncak atau diakhiri oleh aksi militer.

PENUTUP

People power adalah sebuah fenomena yang terjadi di Mesir, yang dilakukan oleh rakyatnya sebagai akibat dari kepemimpinan Presiden Mursi , yang dinilai melakukan banyak penyimpangan dan pengkhianatan terhadap cita-cita revolusi *Arab Spring* 2011, sehingga menimbulkan krisis politik dan ekonomi yang berkepanjangan. Dengan adanya hal itulah, yang kemudian menjadi dorongan rakyat untuk melakukan perubahan melalui gerakan *People power*.

Substansi *people power* berupa penyebaran propaganda melalui media sosial secara massif dan aksi turun ke jalan secara serempak, meluas, dan besar-besaran di seluruh Mesir bertujuan untuk menyatukan kekuatan rakyat . Semakin besar sumber daya yang dimobilisasi, semakin besar pula tekanan yang diterima Mursi sebagai pemimpin Mesir. Lebih lanjut, *People power* membuka peluang dan menjadi legalitas bagi militer untuk melakukan kudeta terhadap Presiden Mursi, atas dasar menjaga kestabilan negara dan “menjawab panggilan rakyat”.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Amirullah. 2015. *Kepemimpinan dan Kerjasama Tim*. Jakarta :Mitra Wacana Media

³² Trias Kuncahyono. *Loc.cit.* Hal 330

- Budiarjo,M.2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Carlton Clymer Rodee.,at al.2009. Pengantar Ilmu Politik. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Carter, April. 2012. People Power and Political Change. New York : Roulledge
- Duverger,M. 2010. Sosiologi Politik. Jakarta:Rajawali Pers
- Efriza. 2016 . Kekuasaan Politik : Perkembangan Konsep,Analisis dan Kritik, Malang : Intrans Publishing
- Ethridge,E,M,Hadelman Howard. 2016. Politik Dalam Dunia Yang Berubah. Bandung : Nusa Media
- Jacky,M. 2015. Sosiologi :Konsep, Teori, dan Metode. Jakarta: Mitra wacana Media
- Kaloh,J. 2006. Pemimpin Antara Keberhasilan dan Kegagalan. Jakarta: Kata Hasta
- Kuncahyono, T. 2013. Tahrir Square Jantung Revolusi Mesir. Jakarta : Kompas
- Marham, Idrus. 2016. Ironi Demokrasi setengah Hati. Bekasi : PT Penjuru Ilmu Sejati
- Northouse,P.G. 2013. Kepemimpinan : Teori dan Praktik. Jakarta : Indeks
- Perlmutter, Amos. 2000. Militer dan Politik. Jakarta : Raja Persada Utama
- Raho,B. 2004. Sosiologi Sebuah Pengantar. Maumere : Ledalero
- Rodee,C.C,dkk. 2009. Pengantar Ilmu Politik. Jakarta : Rajawali Pers
- Rokhman,F, Surahmat. 2016. Politik Bahasa Penguasa. Jakarta : Kompas
- Sanderson,S.K. 2011. Makrososiologi : Pendekatan Terhadap realitas Sosiologi. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Semetco,A,H,Scammell Margaret. 2016. Perbandingan Sistem Politik : teori dan Fakta. Bandung :Nusa Media
- Setiawan,M,B. 2009. Mozaik Gerakan Pemuda Kontemporer. Jakarta : Menpora RI
- Setyodarmojdo,S. 2008. Strong Society : Analisa Dasar tentang Politik, Public Relations, dan Budaya.Jakarta :Prestasi Pustaka
- Soekanto,S,& Sulistyowati,B. 2013. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Stephan, Alfred.1988. Militer dan Demokratisasi. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti
- Suardi, Moh. 2015. Ideologi Politik Pendidikan Kontemporer. Yogyakarta : Deepublish
- Syafiee,I.K. 2001. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung : Refika
- Sztompka,P. 2007. Sosiologi Perubahan Sosial. Jakarta: Prenada
- Thompson, B.J.2015. Kritik Ideologi Global. Yogyakarta: IRCiSod
- T. R. Walter Carlsnaes,at.al. 2013. Hanbook Hubungan Internasional 4th ed. Bandung: Nusa Media
- Wibowo. 2016. Kepemimpinan : Pemahaman Dasar, Pandangan Konvensional, Gagasan Kontemporer. Jakarta : RajaGrafindo Persada
- Wirawan. 2014. Kepemimpinan : Teori, Psikologi, Perilaku Organisasi, Aplikasi, dan Penelitian. Jakrta : Rajawali Pers

Jurnal-Jurnal

- Anderson, L. (2011). Demystifying the Arab Spring: parsing the differences between Tunisia, Egypt, and Libya. *Foreign Affairs*, 2-7.
- Aziz, S. F. (2013). Revolution without Reform: A Critique of Egypt's Election Laws. *Geo. Wash. Int'l L. Rev.*, 45, 1
- Beck, M. (2013). The July 2013 Military Coup in Egypt: One normative clarification and some empirical issues. Odense: Center for Mellemostudier.
- Beissinger, M. R. 2012. "Who participated in the Arab spring? A comparison of Egyptian and Tunisian revolutions" .Doctoral dissertation, Department of Politics, Princeton University
- Bhuiyan, S. I. (2011). Social media and its effectiveness in the political reform movement in Egypt. *Middle East Media Educator*, 1(1), 14-20.
- Czuba,C.E. 2014. "Empowerment :What Is It?". *Extention Journal Inc*, ISSN 1077-5315
- Fachir,A.M. 2011. "Gerakan Rakyat Untuk Perubahan :Pembelajaran dari Timur Tengah". *Jurnal Luar Negeri Perubahan di Timur Tengah dan Afrika*. ISSN 0215-1235
- Gonzalez,E.T. 2003." People Power in the Philippines: Between Democratic Passions and the Rule of Law" , *Asian Studies Journal*, Volume 39 Numbers 1 - 2
- Goldstone, J. A. (2011). Understanding the revolutions of 2011: weakness and resilience in Middle Eastern autocracies. *Foreign Aff.*, 90, 8.
- Hassan, H. A. (2010). State versus society in Egypt: Consolidating democracy or upgrading autocracy. *African Journal of Political Science and International Relations*, 4(9), 319-329.
- Henry,N. 2011. "People Power: The Everyday Politics of Democratic Resistance in Burma and the Philippines". Victoria University of Wellington.
- Khozin A.F.A.2012." Konsep Kekuasaan Michel Foucault". *Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*. Volume 2 Nomor 1
- Lang, A. F. (2013). From revolutions to constitutions: the case of Egypt. *International Affairs*, 89(2), 345-363.
- Lubis,A. 2011. "Perubahan Sosial-Politik di Timur Tengah". *Jurnal Luar Negeri Perubahan di Timur Tengah dan Afrika*. ISSN 0215-1235
- Moustafa, T. (2007). The struggle for constitutional power: law, politics, and economic development in Egypt. Cambridge University Press.
- Muhamad Asrory Mulki. 2012. "Gerakan Agama dan Politik di Mesir : Refleksi Ikhwan Al Muslimin dan Revolusi Pemuda Tahrir Square di Kairo" , , *Ilmu Ushuluddin*, Universitas Paramadina ,Volume 1, Nomor 3
- Pena,M.Q.T. 2001. "People Power in A Regime of Cosntitutionalism and The Rule of Law". *Philippine Law Journal*. Vol. 76 No. 1

- Schock, K. (2005). *Unarmed insurrections: People power movements in nondemocracies* (Vol. 22). U of Minnesota Press.
- Setiawan, Azhari. 2015. "Diplomatic Dilemma dan Standar Ganda Politik Amerika Serikat terhadap Konflik Sipil-Militer Mesir Tahun 2013 ", *JOM FISIP* , Volume 2 No. 1
- Setiawati, S.M. 2011. "Perpaduan Pesona dan Problema Pergolakan Politik Mesir". *Jurnal Luar Negeri Perubahan di Timur Tengah dan Afrika Utara*. ISSN 0215-1235
- Shirky, C. (2011). *The political power of social media: Technology, the public sphere, and political change*. *Foreign affairs*, 28-41.
- Stein, E. (2012). *After the Arab Spring: power shift in the Middle East?: revolutionary Egypt: promises and perils*.
- Sujatmiko. 2011. "Constelation and Change In The Middle East : Sudanese Case", *Jurnal Luar Negeri Perubahan di Timur Tengah dan Afrika*. ISSN 0215-1235
- Swartz, D. N. (2015). *Indeterminate and Unrecognized: Exploring the Relationship between the Morsi Ouster, Post-Coup Sanctions, and the Recongition Power*. *NYUJ Legis. & Pub. Pol'y*, 18, 377
- Umar, M.R.A, dkk. 2014. "Media Sosial dan Revolusi Politik; Memahami Kembali Fenomena "Arab Spring" dalam Perspektif Ruang Publik Transnasional". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, vol 18, Nomor 2. ISSN 1410-4946

Internet

- Barker, M. 2011. "People Power In Egypt : Defusing of Revolution?", <http://www.countercurrents.org/barker150311.pdf> diakses pada tanggal 2 februari 2017
- "Kamus Besar Bahasa Indonesia Online" .<http://www.kbbi.web.id/revolusi> diakses pada 26 Desember 2016
- "Mursi Menangi Pilpres Mesir" .2012. <http://internasional.kompas.com/read/2012/06/24/2202526/Mursi.Menangi.Pilpres.Mesir> diakses pada tanggal 28 Desember 2016
- Ghafur, M.F." Agama dan Demokrasi :Munculnya Kekuatan Politik Islam di Tunisia, Mesir dan Libya". *Jurnal Penelitian Politik* Vol.11 No.2, <http://ejournal.lipi.go.id/index.php/jpp/article/203/87> diakses pada tanggal 1 januari 2017
- Podeh, E. 2011. "Farewell to an Age of Tyranny? Egypt as a model of Arab Revolution" http://www.ifes.org/~media/Files/Publications/White%20PaperReport/2011/2011_egypt_briefing_paper_II.pdf diakses pada tanggal 19 Februari 2017

Koran

- Musthafa. "Pendukung Mursi Mulai Melakukan Perlawanan". *Harian Kompas*. 6 Juli 2013.